



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Barito Kuala, 25 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Tapus, 15 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H., Advokat pada Kantor "LAM & Partners" yang berkantor di Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 541/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 28 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 19 April 2019 di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 22 Mei 2020;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan surat pengumuman nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengajukan pengesahan nikah yang telah kami langsunjkan sebelumnya namun tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan/*sirri* pada tanggal 19 April 2019 di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali yang berwakil kepada penghulu bernama Penghulu, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 22 Mei 2020;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mohon agar diperiksa;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 April 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya,

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



bermeterai cukup, dan telah di-*nazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 April 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dengan Nomor XXX atas nama Pemohon I dengan Pemohon II binti Wali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 27 September 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 April 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX atas nama Kepala Keluarga Wali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 April 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



1. Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Paman Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada 19 April 2019 di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang pertama saksi nikah bernama Saksi nikah 1 dan yang kedua saksi nikah bernama Saksi nikah 2, sedangkan maharnya adalah berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- 2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di RT.007 Rw.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Paman Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada bulan 19 April 2019 di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang pertama saksi nikah bernama Saksi nikah 1 dan yang kedua bernama Saksi nikah 2, sedangkan maharnya adalah berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 2 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Para Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh



Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



pada tanggal 19 April 2019 di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, oleh karena akta tersebut merupakan akta dibawah tangan maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I berdomisili dan tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon II berdomisili dan tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan juga menguatkan alat bukti surat P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2019 di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertindak sebagai dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan/keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin juz 4* yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من
الحقوق كالصّداق والنّفقة والمراث أو لم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang



berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له
دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Para Pemohon untuk diitsbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkrit dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai



bukti status perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, yang memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2021/PA.Blcn



2019 di Desa XXX, dahulu Kecamatan XXX sekarang Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah* oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)